



**Judul** : Menyoroti Diplomasi Parlemen  
**Tanggal** : Senin, 17 September 2012  
**Surat Kabar** : Pelita  
**Halaman** : 20

## Menyoroti Diplomasi Parlemen

**Efektivitas diplomasi parlemen perlu disoroti. Peralnnya, puluhan miliar dihabiskan setiap tahunnya.**

**S**EBUAH foto, kata orang, berbicara ribuan kata. Dan itulah tampaknya yang bisa dikatakan dari foto yang menggambarkan sejumlah anggota DPR yang tengah *plestiran* di Denmark, awal September. Foto menunjukkan rombongan anggota dewan kapal yang bisa dipakai turis di Nyhavn, Kopenhagen, sekitar pukul 14.30 waktu setempat. Namun, tak disebutkan hari dan tanggalnya. Foto itu diterima redaksi *Kompas.com* dari seorang warga Indonesia yang sedang berada di Kopenhagen.

Foto itu kontan membuat heboh. Rombongan dimaksud adalah anggota Badan Legislatif DPR yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Denmark dan Turki untuk mencari informasi terkait logo yang akan digunakan dalam pem-

bahasan Rancangan Undang-Undang tentang Palang Merah. Tapi, lantas mengapa mereka masih sempat-sempatnya berwisata di tengah kunjungan kerja? Pertanyaan selanjutnya, apakah mencari informasi hanya untuk sebuah logo harus sampai berkunjung ke negara ribuan mil jauhnya dari Tanah Air, yang tentunya menghabiskan anggaran negara yang tidak kecil?

Persoalan kunjungan kerja DPR ke luar negeri sejatinya bukan persoalan baru. Banyak pihak mempersoalkan urgensi kunjungan kerja tersebut jika dibandingkan dengan besarnya uang rakyat yang digunakan. Berdasarkan data yang dirilis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), sesuai data Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2012, kunjungan kerja dewan 2012 diperkirakan bakal me-

nyedot Rp140,12 miliar dari kas negara. Jumlah tersebut naik dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp137,45 miliar.

Sorotan makin mengerucut ketika data tersebut menunjukkan bahwa Badan Kerja Sama Antar

Parlemen (BKSAP) mendapat jatah tertinggi di antara badan kelengkapan dewan lainnya. BKSAP pada 2012 ini mendapat Rp29,89 miliar. Rinciannya, menurut rilis FITRA, Rp15,72 miliar untuk kunjungan ke luar negeri dalam rangka kerjasama bilateral; Rp8,57 miliar untuk menghadiri sidang internasional; Rp4,60 miliar untuk sidang regional; dan Rp993 juta un-

tuk sidang asosiasi bagi Sekretaris Jenderal DPR.

BKSAP merupakan alat kelengkapan dewan yang secara khusus ditugaskan untuk menangani urusan luar negeri, menjalin dan membina hubungan persahabatan DPR dengan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral. Guna mencapai hasil yang optimal, BKSAP melakukan tiga keg-

iatan utama: kunjungan muhibah ke parlemen negara lain; berperan serta dalam konferensi parlemen, baik tingkat regional maupun internasional; dan membentuk grup kerjasama bilateral yang sejak 1993 telah terbentuk 35 Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB).

Intinya, BKSAP adalah pemeran utama diplomasi parlemen yang menjadi tugas DPR. "Diplomasi parlemen itu diplomasi yang *mem-backup* diplomasi utama, yakni *track* pertama G to G. Diplomasi parlemen itu *second track diplomacy*," kata Ketua BKSAP DPR RI Surahman Hidayat kepada Harian Pelita, Jumat pekan lalu.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera itu, diplomasi parlemen penting karena hubungan diplomasi tidak cukup dilakukan antareksekutif. Parlemen dapat juga melakukan peran diplomasi. "Indonesia, misalnya, akan mengadakan program kerjasama ASEAN, maka perlu dukungan legislasi dan anggaran. Kalau parlemen tidak merespon, dengan kata lain tidak membuat payung hukum dan anggarannya, ya tidak jadi program kerjasama itu," kata Surahman mencontohkan.

Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Sebastian

Salang pernah menyatakan bahwa reaksi negatif masyarakat kepada kunjungan kerja DPR ke luar negeri karena dampaknya yang tak dirasakan. Selain itu, banyak anggota dewan peserta rombongan yang tak mengetahui agenda kunjungan tersebut.

Sinyalemen Formappi bisa jadi benar. Dalam Laporan Kinerja Tahunan BKSAP DPR RI, diangkat sejumlah permasalahan. Pertama, kunjungan kerja GKSB dikeluhkan tak efektif sehingga semua rencana kunjungan pada 2010 ditunda. Selain itu, banyak anggota delegasi BKSAP yang tidak mempersiapkan diri sehingga tak berkontribusi maksimal dalam berbagai konferensi yang diikuti. Tak hanya itu, hasil-hasil sidang, baik regional maupun internasional, juga banyak yang tak ditindaklanjuti oleh komisi-komisi di DPR.

"Diplomasi itu beda dengan dagang. Jadi tidak bisa kami melakukan diplomasi, terus hasilnya langsung ada seketika itu juga," bantah anggota BKSAP dari Fraksi PAN Mubammad Nadjib menolakan anggapan kerja diplomasi parlemen BKSAP tak efektif. Menurutnya, hasil diplomasi baru akan dirasakan dalam beberapa tahun ke depan. [man, eboy]